

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI
PUSKESMAS BIROMARU TAHUN 2018**

***THE EVALUATION OF HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM IN
BIROMARU PUBLIC HEALTH CENTER 2018***

¹Risky Aulia Ningsih, ²Sudirman, ³Sriwahyudin moonti

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : riskyauliann15@gmail.com)

(Email : sudirman.aulia@gmail.com)

(Email : sriwahyudin.moonti@gmail.com)

ABSTRAK

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Biromaru Tahun 2018 berkaitan dengan evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penentuan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi evaluasi proses ada hambatan dalam program BOK, dari segi evaluasi manfaat belum sepenuhnya memberikan manfaat dan dari segi evaluasi akibat bahwa capaian pada program belum tercapai secara maksimal di Puskesmas Biromaru Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dalam menentukan langkah kedepan demi memaksimalkan pencapaian program puskesmas Biromaru sebagai lembaga kesehatan di wilayah kerjanya, khususnya terhadap program yang berkenaan dengan Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kata Kunci: Proses, Manfaat, Akibat, BOK

ABSTRACT

Health Operational Assistance (HOA) is an assist from the Central Government to Local Governments to the support Public Health Centers operation to achieve national priority health programs in health sector, especially promotive and preventive activities. This research aims to evaluate the Health Operational Assistance program at Biromaru Health Center in 2018 relating to process, benefit and consequent evaluations. This is a type of descriptive research with a qualitative approach. The informants were taken using Snowball Sampling technique. The result shows that in terms of process evaluation, there are some obstacles in HOA program, in terms of benefits evaluation, it does not fully provides benefits and in terms of effect evaluation, the achievement of the program has not been maximally achieved. This research is expected to be able to provide a view in determining future steps to maximize the achievement of Biromaru Public Health Center programs as a health institution in its working areas, especially for programs related to Minister of Health regulation No. 43, 2016 concerning Minimum Service Standards.

Keywords: Process, Benefit, Effect, Health Operational Assistance

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya (Permenkes RI, 2016).⁽¹⁾

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diluncurkan sejak tahun 2010 merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK juga sebagai dukungan pembiayaan dipuskesmas, yang ditujukan untuk membantu membiayai berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) .

Penyaluran dana BOK adalah salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan pencapaian target yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai tolak ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sasaran dari penggunaan dana BOK yaitu Puskesmas dan jaringannya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota beserta Balai Kesehatan Masyarakat dan Instalasi Farmasi sebagai UPT-nya dan Dinas Kesehatan Provinsi beserta Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT-nya.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mendorong agar Puskesmas mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan di wilayah kerjanya melalui lokakarya mini, selanjutnya disusun rencana kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan kinerja Puskesmas, Poskesdes dan Posyandu tentu akan berdampak positif bagi masyarakat yang dilayani.

Sejak diluncurkan dana BOK pertama kali pada tahun 2010, telah banyak dilakukan penyempurnaan, seperti kebijakan mekanisme penyaluran dana, pengorganisasian, ruang lingkup BOK dan sebagainya. Setiap tahun pelaksanaan BOK terus dievaluasi dan hasil evaluasi ini menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan BOK selanjutnya, baik teknis maupun manajemen.

Evaluasi diperlukan dalam program ini pada dasarnya agar dapat menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan. Sebuah program yang dijalankan akan mengalami keberhasilan ataupun kegagalan ditentukan oleh pelaksana program. Apabila program tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka kemungkinan akan dapat dikatakan baik dan dapat dilihat apakah program tersebut sudah mampu menjawab sesuai akan kebutuhan masyarakat selama ini. Pelaksanaan pelayanan dalam program ini yang menjadi salah satu fokus perhatian penting dalam evaluasi kebijakan ini.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi program dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Biromaru Tahun 2018.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Maksud dari peneliti menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman serta informasi yang menyeluruh tentang evaluasi program dana BOK di Puskesmas, sebagai upaya pemerintah dalam pembangunan kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Biromaru Kecamatan Sigi Biromaru Kab. Sigi. Dengan waktu penelitian dari bulan April sampai dengan Mei.

HASIL

Peneliti melakukan observasi dan diperoleh informasi dari informan di Puskesmas Biromaru, bahwa Evaluasi proses mengenai program BOK di Puskesmas Biromaru menemukan beberapa hambatan dalam program BOK oleh Puskesmas. Ini menjadi perhatian baik untuk pemerintah pusat dan daerah juga pihak puskesmas itu sendiri agar pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif. Beberapa hambatan yang di dapat yaitu karena pencairan APBD yang ribet, luasnya wilayah kerja Puskesmas.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diluncurkan sejak tahun 2010 merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK ini sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.

Dalam meningkatkan pencapaian target yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dapat dilihat dari capaian yang didapatkan dari masing-masing program yang ada setelah adanya program BOK dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan juga sudah maksimal, karena terbantu dengan adanya BOK.

PEMBAHASAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian upaya dari kesehatan masyarakat. BOK diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan keluarga.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Wirawan (2012:17)⁽⁷⁾ mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat. Evaluasi terhadap program BOK merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat efektifitas proses pelaksanaan program tersebut di Puskesmas Biromaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait evaluasi proses yang telah di sampaikan berkaitan dengan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Biromaru, bahwa dengan dana BOK yang dialokasikan untuk Puskesmas pada tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi target yang ingin dicapai. Hal ini pula dikarenakan tidak sesuai luas wilayah kerja dengan anggaran yang diberikan. Mengingat bahwa wilayah kerja dari Puskesmas Biromaru ini terdapat 17 desa yang dibawah naungan Puskesmas Biromaru.

Pemerintah pusat selalu mengingatkan bahwa BOK ini bersifat suplemen, yang berarti tidak untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama bidang kesehatan disuatu wilayah. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk tetap mengusung program-program utama dibidang kesehatan dengan sumber pendanaan sendiri. Oleh karena itu

komitmen dan tindakan nyata Pemerintah Daerah tetap diperlukan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai, terutama untuk kegiatan promotif dan preventif.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes RI 43 Tahun 2016, ada duabelas jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Biromaru yang kedua belas pelayanan tersebut rata-rata mempunyai hambatan yang sama, yakni kurangnya tenaga kesehatan dalam program yang ada di Puskesmas Biromaru, keterbatasan alat untuk pemeriksaan HIV-AIDS, serta peran masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh pihak Puskesmas. Sehingga capaian program pada tahun 2018 tidak mencapai target yang ditentukan.

Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan anggaran BOK yang diberikan diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap program tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan dari BOK itu sendiri yakni meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat, mendukung pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin yang bermutu, merata dan terjangkau dipelayanan kesehatan dasar serta meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan tersier dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat primer di Puskesmas.

Sesuai dengan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Biromaru yang belum sepenuhnya tercapai dapat disimpulkan belum sepenuhnya memberikan manfaat dan perubahan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Namun demikian pernyataan yang berbeda dikemukakan Kepala Puskesmas Biromaru dr. Nurul Eksan bahwa dengan program BOK yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan telah dilaksanakan sesuai dengan Juknis BOK 2018 Puskesmas Biromaru telah memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Dalam evaluasi akibat, diharapkan ada perubahan sebelum dan sesudah program BOK di laksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, sejak tahun 2010 diberikan BOK kualitas pelayanan semakin meningkat, namun belum sepenuhnya maksimal. Dilihat dari capaian program yang ada, dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh program BOK terkait SPM Puskesmas Biromaru belum tercapai secara maksimal.

Secara garis besar terkait tiga indikator evaluasi yang ditemukan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa program BOK yang diberikan kepada Puskesmas Biromaru belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2016. Ditinjau dari capaian program yang rata-rata tidak mencapai seratus persen, bahkan ada

yang pencapaiannya dibawah lima puluh persen, apalagi dengan adanya peningkatan pengajuan anggaran setiap tahunnya, semakin menguatkan pernyataan peneliti bahwa Program BOK pada Puskesmas Biromaru belum sepenuhnya maksimal.

Dalam sebuah Jurnal dikatakan bahwa pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap output menyangkut terlaksananya program bantuan operasional kesehatan dan tercapainya cakupan program, jika dilihat dari hasil cakupan sebelum ada BOK menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cakupan, Akan tetapi kalau kita hubungkan dengan target SPM 2015 belum tercapai. Dengan demikian program Dana Bantuan Operasional Kesehatan kedepan diperlukan evaluasi berkala pertriwulan atau persemester guna mewujudkan capaian SPM 2015(Dasmar, 2016).⁽⁸⁾

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa capaian untuk masing-masing program belum sesuai dengan capaian yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Biromaru. Program yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Biromaru yang belum sepenuhnya tercapai dapat disimpulkan belum sepenuhnya memberikan manfaat dan perubahan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Akibat yang ditimbulkan oleh program BOK terkait SPM Puskesmas Biromaru belum tercapai secara maksimal.

Diharapkan mampu memberikan pandangan dalam menentukan langkah kedepan demi memaksimalkan pencapaian program puskesmas Biromaru sebagai lembaga kesehatan di wilayah kerja Biromaru, khususnya terhadap program yang berkenaan dengan Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bacaan yang berguna bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas Biromaru. Profil Puskesmas tahun 2018

Sri Hartatik. Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Kesehatan Kota Sorong Tahun Anggaran 2015. Jurnal Pifis. 2016

Wirawan. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Provesi PT. Raja Grafindo Persada. Depok. 2012

Dasmar. Studi Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten luwu. Jurnal AKK. 2016